

**Peranan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Adat  
Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat**  
(Study : Tanah Ulayat Kenegerian Pangean  
Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Program Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH :**

**BOSMAN RIADI**  
**10576002782**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDY ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

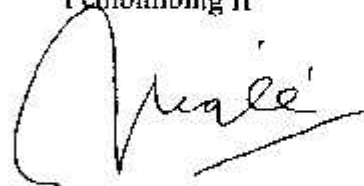
Nama : BOSMAN RIADI  
Nim : 10576002782  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Peranan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat (Study : Tanah Ulayat Kenegerian Pangean kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi)

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

  
Drs. ALMASRI, M.Si  
Nip. 196708012005011007

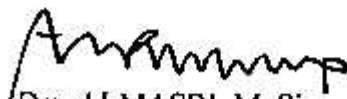
Pembimbing II

  
AFRINALDI RUSTAM, S.IP, M.Si  
Nip. 10370730013



Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu Sosial  
  
Drs. WAR HARAHAP, M. Si  
Nip. 195602021984031002

Ketua Jurusan Ilmu  
Administrasi Negara

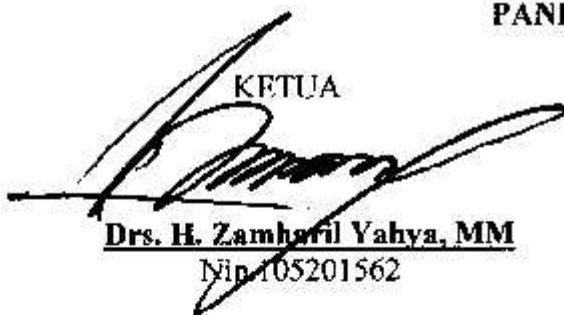
  
Drs. ALMASRI, M. Si  
Nip. 196708012005011007

## LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BOSMAN RIADI  
NIM : 10576002782  
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
TANGGAL LULUS : 11 APRIL 2011  
JUDUL : PERANAN PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA ADAT  
DALAM PEMANFAATAN TANAH ULAYAT (STUDY: TANAH  
ULAYAT KENEGERIAN PANGEAN KEC. PANGEAN KAB.  
KUANTAN SINGINGI)

### PANITIA PENGUJI

KETUA



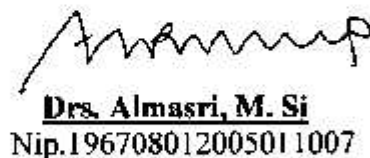
Drs. H. Zamharil Yahya, MM  
Nip.105201562

SEKRETARIS



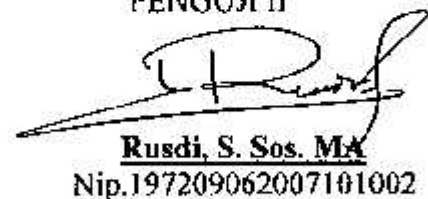
Tareq Kemal, S. Sos  
Nik. 13070730013

PENGUJI I



Drs. Almasri, M. Si  
Nip.196708012005011007

PENGUJI II



Rusdi, S. Sos, MA  
Nip.197209062007101002

## KATA PENGANTAR

Puji dan shukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagaimana yang diharapkan.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada bidang ilmu social Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul penelitian : **Peranan Pemerintahan Desa Dan lembaga Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat ( Study : Tanah Ulayat Kenegerian Pangean Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi ).**

Disini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, pengarahan, serta motifasi yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Drs. Azwar Harahap, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Drs. Almasri, M. Si. Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah berkenan mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Afrinaldi Rustam, S. IP. M. Si Selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Almasri, M. Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak / Ibu Dosen beserta para Staf Pegawai, khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepada ayahanda dan Ibunda serta seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dukungan baik materil maupun secara moril hingga penulis berhasil menyelesaikan studi ini.
7. Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Kenegerian Pangean Serta Penghulu Nan Barompek Kenegerian Pangean yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data penelitian.
8. Tak lupa pula buat rekan-rekan semuanya yang tak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan studi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga semua kobaikan yang telah diberikan mendapat keridaan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat, *amin ya Rabbal Alamin*.

Pekanbaru April 2011

Penulis

BOSMAN RIADI

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
a. Tujuan Penelitian .....	7
b. Manfaat Penelitian .....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Pengertian Pemerintah .....	10
2.2. Pemerintahan daerah .....	10
2.3. Pemerintahan Desa.....	13
2.4. tanah Ulayat dan Pemanfaatannya .....	20
2.5. Hipotesis .....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	24
3.2. Sumber Data .....	24
3.3. Populasi Dan Sampel .....	25
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.5. Teknik Analisis Data.....	27
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM KECAMATAN PANGEAN.....</b>	<b>28</b>
4.1. Tinjauan Geografis.....	28
4.2. Mata Pencarian Penduduk.....	30
4.3. Agama dan Kepercayaan.....	32

4.4. Adat Istiadat.....	33
4.5. Pendidikan dan Bahasa Masyarakat.....	34
4.6. kesenian Masyarakat.....	35
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
5.1. Fungsi Tanah Ulayan Negeri Pangean.....	37
5.2. Fungsi Lembaga Adat Negeri Pangean.....	40
5.3. Peranan pemerintahan desa dan lembaga adat dalam pemanfaatan tanah ulayat.....	43
5.4. Hubungan Antara Adat, Masyarakat Adat dan Tanah Ulayat .....	44
5.5. Peranan Pemerintahan Desa terhadap lembaga Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kenegerian Pangean .....	48
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
6.1. Kesimpulan .....	53
6.2. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN</b>	

**PERANAN PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DALAM  
PEMANFAATAN TANAH ULAYAT ( STUDY : TANAH ULAYAT KENEGERIAN  
PANGEAN KEC. PANGEAN KAB. KUANTAN SINGINGI**

**ABSTRAK**

**OLEH : BOSMAN RIADI**

*Memperhatikan dan meningkatkan secara serius ragam potensi yang tersimpan pada sumber daya manusia dan sumber daya alam, merupakan suatu langkah penting untuk dilakukan oleh berbagai pihak terutama oleh pemerintah dan lembaga adat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Mengingat sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan merupakan komponen utama penggerak roda pembangunan. Dari penjelasan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian, Peranan Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat (Study : Tanah Ulayat Kenegerian Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran dan untuk mengetahui fungsi Tanah Ulayat, lembaga Adat, dan sejauh mana manfaat tanah Ulayat kenegerian Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan untuk perumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagaimana upaya pemerintahan desa dan lembaga adat dalam pemanfaatan tanah ulayat dan bagaimanakah keadaan dan struktur tanah ulayat serta hubungan antara lembaga institusi lembaga adat, tanah ulayat dan masyarakat adat Kenegerian Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif analisis, lokasi penelitian di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, populasi penelitian terdiri dari aparat pemerintahan desa dan pangulu nan barompek dan Masyarakat Kenegerian Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan wawancara terhadap masyarakat dan data skunder yang diperoleh dari kantor dinas dan instansi pemerintah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan a). Dalam hal pemanfaatan tanah ulayat di Kenegerian Pangean diatur dan diawasi oleh penghulu, karena hak pengelolaan ulayat merupakan wewenang dari Penghulu Nan Barompek yang ada di Kenegerian Pangean. b). Masyarakat mempunyai hak terhadap pemanfaatan Tanah Ulayat. Dalam pengelolaan tanah ulayat harus diketahui atau meminta izin kepada penghulu nan barompek. c). pemerintahan daerah melalui pemerintahan desa dalam menjalankan program pembangunan dipedesaan harus dimusyawarahkan dengan penghulu yang ada di kenegerian pangean. hal ini adalah untuk memperlancar pembangunan dipedesaan. Mengenai pemanfaatan tanah ulayat di kenegerian pangean pemerintah desa tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pemanfaatan ulayat tersebut. Walaupun demikian hak terhadap tanah ulayat hanya pemanfaatan tanah yang dikelola oleh masyarakat untuk bertani, tapi harus diketahui oleh penghulu.*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen tentang Pemerintahan Daerah. Bersumber dari pasal 18 tersebut maka lahiriah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Desentralisasi). Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah. Hal ini adalah yang memberikan peluang dan kebebasan kepada masing-masing daerah untuk membentuk dan mendirikan daerah-daerah yang bersifat otonom. Sehingga daerah-daerah itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi daerah yang berdiri-sendiri. Otonomi daerah (desentralisasi) merupakan penyerahan wewenang dan fungsi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing tanpa ada intervensi dan daerah/pihak lain.

Dalam perjalanannya, ternyata Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 masih banyak kelemahan. Kelemahannya inilah yang akhirnya melahirkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi terhadap undang-undang sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 inilah masing-masing lembaga Negara bekerja sesuai dengan fungsi dan wewenangnya tanpa adanya saling mendominasi kekuasaan dimasing-masing lembaga.

Ryas Rasyid (2002:16) mengatakan, posisi kebijakan otonomi sebuah proyek pengembalian harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Dibidang politik, otonomi daerah merupakan kebijakan desentralisasi dan demokratisasi dalam hal untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala daerah secara demokratis. Dibidang ekonomi, otonomi daerah harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan nasional di daerah dan terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal dan regional untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dibidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya.

Dengan pembentukan daerah otonom baru, masyarakat di daerah tersebut berharap, menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Tujuan akhirnya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. (Asrinaldi 2004 : 22).

Dalam hal ini, dengan adanya otonomi daerah maka di Propinsi Riau melahirkan daerah-daerah otonom baru sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 mengenai pemekaran beberapa daerah di propinsi Riau. Salah satunya adalah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu (Dewi Suspita Yanti 2005:5).

Dalam sistim pemerintahan dan struktur kekuasaan Kabupaten Kuantan Singingi dimasa lampau, terutama sebelum kemerdekaan, nilai-nilai adat dan

masyarakat adat mendapat tempat yang terhormat dan sebagai dasar pengaturan kehidupan sosial dan pemerintahan masyarakat Kuantan Singingi sendiri. Pada awal kemerdekaan, sesuai dengan semangat revolusi waktu itu yang benci terhadap Belanda, maka nilai dan institusi adat kita juga disingkirkan oleh suasana revolusi tersebut. Proses menyingkirkan ini mengalami puncaknya ketika birokrasi pemerintah diatur secara nasional sampai pemerintahan desa. Pemerintahan desa akhirnya, yang semula masih relative otonomi, akhirnya menjadi bagian dari birokrasi Negara dan tercabut dari nilai dan potensi masyarakat desa sendiri.

Menyadari kelemahan-kelemahan masa lampau itu, pada masa reformasi sekarang dengan adanya otonomi daerah maka terbukalah kesempatan bagi daerah untuk mengatur, membangun dan mengelolah birokrasi pemerintahan di daerah khususnya pemerintahan desa yang berakar pada nilai dan potensi masyarakat lokal adat atau berawal dari pemberdayaan masyarakat adat melalui institusi-institusi adat di pemerintahan desa atau kenegarian.

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang semula terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan kemudian terjadi pemekaran di beberapa kecamatan sehingga sekarang Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan. Sehingga menimbulkan banyaknya persoalan di daerah-daerah akibat diberlakukannya otonomi daerah dikarenakan masing-masing daerah, dalam hal ini kecamatan memiliki aset daerah yang nantinya dapat menopang pertumbuhan ekonomi di kecamatan tersebut dan Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan otonomi daerah untuk mensejahterakan rakyat di daerah bisa terealisasi. Dalam hal ini,

Kecamatan Pangan yang merupakan bagian teritorial dari kabupaten Kuantan Singingi yang letaknya sangat strategis ditengah kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai.

Sejak masa orde baru nilai-nilai adat di kenegerian pangean masih terlihat eksistensinya, namun setelah diberlakukannya otonomi daerah yang dipengaruhi oleh modernisasi. Dimana mudahnya pengaruh dari budaya luar masuk ke suatu daerah yang berakibat terhadap lunturnya nilai-nilai adat. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan, dimana yang muda tidak lagi menghormati yang tua dan yang tua tidak lagi menyayangi yang muda serta komekan tidak lagi hormat kepada niniak mamaknya hal ini dikarenakan tidak terkontrolnya perbuatan atau tingkah laku dari masing-masing pihak.

Lunturnya nilai-nilai adat di kenegerian pangean mengakibatkan sistim pemerintahan di Kenegerian Pangean yang selama ini terselenggara dengan baik dan benar menjadi ancaman bagi lembaga adat. Karena dalam situasi pemerintahan yang seperti ini, lembaga adat selalu dikendalikan dan dimanfaatkan oleh institusi birokrasi pemerintahan. Sehingga terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat adat, bahwa selama ini mereka mementingkan kepentingan bersama dengan nilai-nilai universal yang disebut asas gotong royong, saling panggil-memanggil dan sampai-menyampaikan dalam masyarakat tidak lagi terlihat dalam kehidupan masyarakat adat pangean meskipun tidak seluruhnya hilang.

Kondisi inilah yang memunculkan berbagai persoalan yang terkait dengan kepentingan hidup yang sebenarnya telah diatur oleh adat. Sebab salah satu nilai adat adalah adat bersendi syara, syara' bersendikan kitabullah. Persoalan yang

timbul adalah berkaitan dengan tuntutan kehidupan dalam bidang ekonomi, misalnya dalam persoalan harta warisan dan tanah ulayat. Adat pusaka ada yang boleh dibagi dan adapula yang tidak boleh dibagi. Pusaka renda dapat dibagi dalam keluarga, sedangkan pusaka tinggi tidak boleh dibagi tetapi menjadi milik bersama. Tanah ulayat dalam hal ini dapat berbentuk tanah hutan atau tanah perkebunan yang sudah lama digarap.

Pemanfaatan tanah ulayat tersebut oleh para kemenakannya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sepanjang adat. Apabila terjadi pengrusakan hutan oleh seorang kemenakan, maka ia harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang suda ada. Sepanjang menghormati adat, maka orang luar tidak sepatasnya mengambil hutan tanah ulayat dengan semena-mena tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan niniak mamak.

Oleh karena adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai pertanahan (Agraria), maka pengelolaan tanah ulayat ini disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku, yakni PP No. 11 Tahun 2010, tentang penertiban dan pendayagunaan lahan/tanah terlantar untuk kepentingan kaum tani, nelayan dan buruh, serta masyarakat adat.

dibawah pengawasan Pemerintah Daerah. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka yang langsung berkaitan dengan tanah ulayat adalah desa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang ada kaitannya dengan adat-istiadat adalah Pasal 209 dan 211, dimana Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain berfungsi sebagai pengayom Adat-istiadat, membuat peraturan-peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (A. Basar Harahap, 2005:18).

Luas ulayat Kenegerian Pangean tidak ada bukti tertulis yang menentukan jumlah dan luasnya. Melainkan luas ulayat Kenegerian Pangean itu terbentang sepanjang Hutan Sako ( Rimbo Sako ) dan Hutan Air Hitam ( Rimbo Air Hitam )

Batas wilayah ulayat Pangean adalah :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Inuman.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Ulayat Sentajo.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Sailan, Kampar.
4. Sebelah Selatan berbatasan Dengan Sei. Elang kecil dan besar, peranap.

Berawal dari berbagai fenomena mengenai tanah ulayat diatas, maka perlunya untuk mempertahankan dan memanfaatkan tanah ulayat tersebut untuk kepentingan masyarakat adat disuatu daerah. Atas dasar pemikiran seperti itulah, penulis menetapkan judul penelitian ini yaitu : **" Peranan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat (Studi : Tanah Ulayat Kenegerian Pangean Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi)"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana upaya Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat dalam pemanfaatan tanah ulayat di Kenegerian Pangean?
2. Bagaimanakah keadaan dan struktur tanah ulayat kenegerian pangean kecamatan pangean?

3. Bagaimanakah hubungan antar lembaga institusi adat, tanah ulayat dan masyarakat adat Kenegerian Pangean di wilayah Kecamatan Pangean?

### **1.3 Tujuan dan manfaat penelitian Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi Tanah Ulayat di Kenegerian Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui fungsi Lembaga Adat dan pemanfaatan Tanah Ulayat di Kecamatan Pangean.
3. Untuk mengetahui peranan Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat dalam pemanfaatan tanah ulayat di Kenegerian Pangean, Kecamatan Pangean.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi penulis, bahwa penelitian ini merupakan sebagai pelajaran yang akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam melaksanakan ilmu pemerintahan, khususnya tentang peranan Pemerintahan Daerah ditingkat Pemerintahan Desa terhadap Lembaga Adat dalam pemanfaatan tanah ulayat pangean.
  - b. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan kajian ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.

## 2. Manfaat secara praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Pemerintahan Desa serta Lembaga Adat dalam wilayah Kecamatan Pangean bagi daerah-daerah lain.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian berikutnya yang ada kaitannya dengan tanah ulayat.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Penggambaran singkat tentang isi penelitian ini akan di uraikan penulis dengan membagi enam bab yang terdiri dari :

**BAB I Pendahuluan:** Bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

**BAB II Tinjauan Pustaka dan Hipotesis:** Bagian ini menggambarkan tentang teori-teori serta berbagai pengertian-pengertian tentang pemerintahan, desa dan tanah ulayat.

**BAB III Metodologi Penelitian:** Bagian ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis / sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

**BAB IV Gambaran umum Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi:** Bagian ini menggambarkan dan menguraikan tentang gambaran umum Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, diantaranya (1)Letak geografis dan batas wilayah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.(2)Batas-



batas wilayah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.(3)Propil penduduk kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

**BAB V Hasil penelitian dan Pembahasan:** Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang dilakukan, dalam bab ini menggambarkan semua hasil penelitian. Dan berhubungan langsung dengan tujuan penelitian.

**BAB VI Penutup:** Bagian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pemerintah**

Pemerintah adalah sekelompok orang yang menjalankan proses pemerintahan dalam sebuah Negara untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintah dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislative, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, sedangkan pemerintah dalam arti sempit ialah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara. Pandangan yang sama dimana pemerintah itu mempunyai pengertian dalam arti luas dan sempit. Pemerintah dalam arti luas beartiseluruh fungsi Negara seperti legislative, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja. Ramlan Surbakti (1992 : 169)

#### **2.2 Pemerintah Daerah**

Pemerintahan dikenal sejak dikeluarkannya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir 1 adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat untuk menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan, hal ini memberikan peluang dan peran yang besar pada

daerah untuk melakukan sendiri-sendiri upaya mensejahterakan masyarakat termasuk penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

Mengenai pemerintahan daerah, di atur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah dalam konteks Indonesia, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintahan daerah dapat berupa :

1. Pemerintahan Daerah Propinsi, yakni terdiri dari Pemerintahan Daerah Propinsi dan DPRD Propinsi. Pemerintah Daerah Propinsi terdiri atas Gubernur dan perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
2. Pemerintah Daerah kabupaten/Kota, yakni terdiri dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam hal mengatasi permasalahan yang terjadi di daerah-daerah. Maka dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas, antara lain :

### 1. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya. Dalam konteks hubungan kekuasaan, implikasi dan diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah desentralisasi kewenangan dan sumberdaya dan pemerintah pusat kepada daerah. Desentralisasi bias merupakan pelimpahan kewenangan dalam mengelola keuangan (fiskal), urusan administrative untuk menyediakan berbagai layanan terhadap masyarakat dan politik yaitu dalam pengambilan kebijakan di daerah diserahkan kepada daerah.

### 2. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan fungsi dan/atau sumber daya kepada instansi daerah dari institusi atau departemen pemerintah pusat. Dalam sistem ini kewenangan tetap berada dalam institusi yang sama.

### 3. Pembantuan

Asas pembantuan merupakan perugasan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Setelah adanya penyerahan wewenang dan fungsi yang sebelumnya berada ditangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah mengakibatkan adanya potensi konflik di daerah-daerah terutama mengenai pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya yang ada di daerah.

Tabrani Rab (2002:89), yang merupakan tokoh masyarakat Riau mengatakan otonomi daerah berpotensi terjadinya konflik yang tinggi, dimana

daerah-daerah yang akan berpolarisasi secara etnik, linguistik, agama dan seterusnya.

Permasalahan seperti ini terjadi karena pelaku pemerintahan di daerah tidak memahami undang-undang yang ada. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban. Makanya masyarakat tidak heran kalau korupsi itu terjadi disegala bidang.

### **2.3. Pemerintahan Desa**

Desa merupakan hirarkis pemerintahan yang terendah yang ada di daerah Kabupaten/Kota. Desa yang dipahami sebagai daerah kesatuan hukum, dimana bertempat tinggalnya suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) untuk mengadakan dan menjalankan pemerintahannya sendiri. Desa berhak mengatur jalannya pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh lurah/kepala desa yang merupakan pilihan masyarakat setempat.

Otonomi daerah adalah untuk membangun tata kehidupan bagi kepentingan penduduk desa, bahwa segala kepentingan dan kebutuhan yang dibutuhkan penduduk desa hanya bias diketahui dan disediakan oleh penduduk desa tersebut bukan dari pihak luar. Dengan adanya Reformasi, yang menghasilkan produk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa "Desa adalah kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten/Kota.

Sebagaimana dalam sistim pemerintah dinegara demokrasi, dikenal dengan "trias politika" yang merupakan terhadap adanya pembagian kekuasaan kedalam tiga unsur dalam supratuktur politik, yaitu adanya lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Dan begitu juga halnya dengan sistim pemerintahan desa yang mempunyai tugas lembaga tersebut.

Dalam sistim pemerintahan desa diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi dikenal dengan lembaga adat. Lembaga adat merupakan lembaga legislative dan yudikatif sangat berperan dalam membangun kehidupan dalam masyarakat adat disuatu desa.

Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permupakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

*QS : Ar-Rum ayat 41.*

Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua

mahluknya khusus nya manusia. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri.

Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan mahluk lainnya. Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Hal ini seringkali tercermin dalam beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ketika menunaikan ibadah haji. Dalam haji, umat Islam dilarang menebang pohon-pohon dan membunuh binatang. Apabila larangan itu dilanggar maka ia berdosa dan diharuskan membayar denda (dam). Lebih dari itu Allah SWT melarang manusia berbuat kerusakan dimuka bumi.

Tentang memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, banyak upaya yang bisa dilakukan, misalnya rehabilitasi SDA berupa hutan, tanah dan air yang rusak perlu ditingkatkan lagi. Dalam lingkungan ini program penyelamatan hutan, tanah dan air perlu dilanjutkan dan disempurnakan. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup.

Adapun tugas lembaga adat, berikut ini penulis kutif rumusan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03, Tahun 1997 Sebagai berikut :

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat.
2. Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka menperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/ketua adat dan pinfinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Selanjutnya Lembaga Adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut :

1. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal yang menyangkut kepentingan dan menfengaruhi adat.
2. Mengelolah hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan tamp hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih layak dan lebih baik.
3. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian lembaga adat berkewajiban diantaranya memelihara stabilitas nasional dan daerah dan menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka menferkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Desa, maka peranan pemuka adat makin berkurang pada kegiatan pemerintahan. Di negeri-negeri tertentu di Kuantan Singingi oleh pendukung adat senantiasa dimanfaatkan, tetapi memang di negeri-negeri lain pemuka adat tidak berfungsi.



Dari zaman orde lama, pemegang teraju atau kendali negeri dari pemangku adat kepada wali negeri. Dengan demikian institusi adat sesungguhnya masih tetap berdiri, hanya kekuasaannya dalam pemerintahan yang sudah hilang. Meskipun demikian wali negeri yang memegang teraju negeri, juga banyak yang merangkap sebagai pemangku adat (sebagai Penghulu, Malin, Monti dan Dubalang).

Di era reformasi ini, dengan adanya undang-undang tentang pemerintahan daerah akan memberikan peluang kepada daerah untuk memfungsikan adat istiadat sesuai dengan asal-usul dan institusi adat untuk membangun masyarakat adat yang akan memperoleh alokasi dana untuk keperluan daerah menurut sumber daya alam yang dimiliki daerah bersangkutan.

Dalam persatuan hukum adat di Kuantan Singingi terdapat hubungan kekerabatan yang diwarisi dan nenek moyang dan mengikat warganya untuk bersatu dalam satu kesatuan hukum adatnya, senasib dan sepenanggungan, tentang dalam pepatah adat :

"Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun"

"Tertelentang sama minum air, terlelungkup sama makan tanah"

"Berat sama dipikul ringan sama dijinjing"

"Saciok bak ayam, sadonciang bak boso"

"Kemudik serentak gala, kehilir serangkuh dayung" (Pepatah adat nagori pangean).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan adat dapat dikaji nilai-nilai adat tersebut sebagai berikut :

### 1. Nilai Agamis

Ungkapan adat yang menyatakan adat bersendi syara' syara' bersendikan kitabullah. Bermakna bahwa adat bersumber dari ajaran agama yang tertuang dalam kitab suci Al Qur'an dan hadist nabi. Ajaran agama Islam menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat, jenis adat ini disebut adat sebenar adat. Adat itu tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan.

### 2. Nilai Politis

Menurut adat di Kuantan Singingi, bahwa pengaturan masyarakat diatur dalam suatu sistem federasi dan konfederasi. Federasi bahwa pemerintahan berpusat di nagori atau koto. Perangkat adat di nagori terdapat sejumlah perangkat adat, seperti penghulu bergelar Datuk, Monti, Dubalang, Tuo Kampung dan Tungganai. Azas yang dianut adalah musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercermin dalam pepatah bulek air dek pembuluh, bulek kato dek mufakat.

### 3. Nilai Sosial

Nilai sosial terwujud dalam kehidupan yang dikenal dengan Batobo atau Gotong-royong. Dalam batobo ini terungkap nilai yang spesifik seperti ungkapannya : Kebukit sama mendaki, kelurah sama menurun, Tertelentang sama minum air, tertelungkup sama makan tanah ( Pepatah Adat)

### 4. Nilai Ekonomi

Adat di Kuantan Singingi mengenal ungkapan susah sama susah, senang sama senang, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hasilnya dikenal dalam ungkapan : hati Gajah sama dilapah, hati tungau sama dicicipi, yang malas diberikan sokam.

## 5. Nilai Kultural

Nilai ini dapat dikaji dari fungsi pemangku adat, misalnya Penghulu memegang amanah, Monti menjalankan amanah, Dubalang memelihara, dan mengawasi amanah, Tuo Kampung mengurus anak cucu kemenakan supaya meneruskan dan menjalankan amanah dalam hidup berkurun kampung, Tunganai menjaga dan memelihara rumah adat. Nilai ini harus dipegang teguh oleh pemangku adat.

## 6. Nilai Etika / Filosofis

Nilai ini disebut juga dengan nilai kesusilaan, yaitu ajaran buruk dan baik dan mengandung pula nilai moral. Dalam adat dikenal ungkapan: anak dipangku, kemenakan dibimbing, kemenakan seperintah mamakdan mamak harus bertanggungjawab membimbing anak cucu kemenakan. Bagi yang melanggar akan mendapat sanksi berat dan ringan. Nilai filosofis adat adalah nilai-nilai hakiki adat yang bersendikan syara' dan kitabullah. Minya ajaran Islam menjadi dasar dari adat Kuantan Singingi yaitu : para datuk adalah seolah-olah adalah khalifah di bumi.

## 7. Nilai Yuridis

Nilai yuridis adalah adat yang mempunyai hukum-hukum yang disebut dengan hukum adat yang meliputi hukum tentang tanah, tentang warisan, perkawinan dan sebagainya.

## 8. Nilai Estetis

Nilai estetis ini meliputi rasa keindahan yang dapat disaksikan secara kongkrit pada arsitektur rumah adat, upacara-upacara adat, dan perangkat

pengiring pada upacara adat tersebut. Ungkapan-ungkapan pada acara-acara adat merupakan prosy lirik atau pantun-pantun atau pepatah-petitih mempunyai sajak-sajak yang indah didengar, upacara pencak silat merupakan gerak yang berirama dan diiringi oleh bunyi-bunyian yang dikenal dengan rarak atau gondang.

#### 9. Nilai Historis

Dalam ungkapan dikenal adat lama pusaka usang. Walaupun adat sesuatu yang berlaku itu telah berlangsung lama tetapi karena turun temurun, maka adat senantiasa tidak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas dan menjadi panutan oleh masyarakatnya secara terus-menerus. Nilai historis pada adat sangat dominan dan memegang peranan penting. Nilai historis adat Kuantan Singingi sebagai adat yang bermula dari adat pada masa kerajaan melayu di sepanjang selat Melaka. Adat Melayu berawal dan nenek moyang orang Melayu yang datang dari daratan Asia Tenggara, seperti dataran Tongkin maupun dan muara sungai Yang She Kiang (Yunan) ke negeri-negeri Sumatera. Jadi kalau ada ungkapan menyatakan, bahwa syara' mendaki adat menurun, bahwa agama Islam mendaki dari selat Melaka ke pegunungan di daratan di Asia Tenggara dan adat menurun dari pegunungan di daratan tersebut yang akhirnya sampai di selat Melaka dan masuk pula ke Riau, terutama ke Kuantan.

#### 2.4 Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Tanah ulayat, yaitu tanah komunal yang dimiliki bersama oleh seluruh warga suatu masyarakat hukum adat, adalah salah satu atribut terpenting dan masyarakat hukum adat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat tanpa

tanah ulayat atau tanah ulayat tanpa masyarakat hukum adat, adalah suatu kemustahilan. Pada negara-negara yang masyarakatnya tidak atau tidak lagi mengenal lembaga kebersamaan seperti suatu masyarakat hukum adat, tidak ada lembaga tanah ulayat ini. Dapat dipastikan bahwa suatu masyarakat hukum adat tidak akan pernah menyerahkan tanah ulayatnya tersebut secara suka rela kepada entitas politik baru ini tanpa alasan yang benar-benar meyakinkan.

Sejarah membuktikan, bahwa ada dua cara yang digunakan oleh entitas politik baru yang bernama negara untuk menguasai tanah ulayat. Cara pertama adalah cara yang sangat kasar, yaitu dengan cara menyerbu dan menaklukkan masyarakat hukum adat tersebut secara militer. Cara kedua adalah cara yang lebih halus, dengan mengembangkan berbagai "ajaran" tentang keabsahan klaim negara terhadap tanah ulayat, yang tidak jarang mengandung sumber daya alam yang kaya, yang akan memberi keuntungan yang besar bagi negara atau pejabat-pejabat negara (Syahmunir, 2004 : 7).

Tanah ulayat adalah tanah tertentu yang dikuasai oleh suatu masyarakat adat dan tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Tanah ulayat adalah tanah yang secara tradisional menurut hukum adat setempat merupakan milik masyarakat secara bersama dalam "kerajaan-kerajaan kecil" yang ada di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tanah ulayat boleh juga dikatakan tanah yang meliputi seluruh tanah yang merupakan wilayah "kerajaan-kerajaan kecil" secara tradisional minus tanah milik pribadi dan tanah negara.

(A. Bazar Harahap, 2005: 14).

Menurut Undang-Undang, sebelum Indonesia merdeka, berlaku Agrarische Wet (Stb No. 55 tahun 1870) bahwa hak ulayat diakui menurut hukum dan berdasarkan pada Domeinverklaring untuk Sumatera yang terdapat dalam pasal 1 dari Stb No. 55 tahun 1870 (A.P. Perlindungan, 1960 : 92).

Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 pasal 3 yang berbunyi “ Tanah ulayat tetap diakui sepanjang Masyarakat Hukum Adat nya masih ada, walaupun hukum Adat itu tidak tertulis. Dan sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2010, tentang penertiban dan pendaya gunaan lahan/tanah terlantar untuk kepentingan kaum tani, nelayan dan buruh, serta masyarakat adat.

Berbicara masyarakat, masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang luas dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ini artinya manusia tidak bisa hidup sendirian, dan senantiasa ia hidup bersama-sama dengan orang lain.

Kemudian masyarakat hukum adalah kelompok-kelompok yang terdapat pada lapisan masyarakat bagian bawah yang amat luas di Indonesia, maka akan tampaklah bahwa pada lapisan bawah yang sangat luas terdapat suatu pergaulan hidup terdiri atas kelompok-kelompok dalam hubungan akrab mesra, yang pola sikap dan tingkah lakunya terhadap alam ghaib, dunia luar, dan terhadap bagian tertentu dari alam kebendaan hanyalah dapat dipahami secara cepat bila kelompok-kelompok tersebut di namakan persekutuan hukum. Pada masyarakat hukum adat, apabila beberapa manusia melakukan perbuatan tertentu maka seluruh masyarakat akan menikmati keuntungan ataupun menanggung kerugian.

Sedangkan masyarakat hukum adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang

diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat yang harus tunduk dan patuh pada hukum positif suatu negara.

Sudah waktunya bagi desa-desa yang mempunyai kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengadakan kesepakatan mengenai tanah ulayat. Untuk memotivasi masyarakat desa ke tujuan itu, maka diperlukan agar Pemerintahan Daerah setempat mengeluarkan Peraturan Daerah atau Instruksi yang mendorong terjadinya musyawarah desa dalam rangka membuat kesepakatan-kesepakatan desa.

## 2.5 Hipotesis

Dari latar belakang, perumusan masalah serta berdasarkan telaah pustaka yang diuraikan di atas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : “ diduga Peranan Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Kenegerian Pangean Kecamatan Pangean masih kurang “

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan Di Kenegerian Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Tanah ulayat dalam wilayah kenegerian pangean berawal dari musyawarah untuk mencapai mupakat yang dilakukan oleh pangulu nan barompek Kenegerian Pangean dan menyepakati hasil sebagai berikut : Ulayat Pangulu Datuak Topo adalah hutan rawang yang dijajari tumbuh-tumbuhan seperti daerah persawahan, kalau kayu, akar dan hasil hutan itu merupakan ulayat Pangulu Datuak Muruanso. Ulayat Pangulu Datuak Pakomo berbentuk tanjung yang menjorok, seperti sungai, sedangkan ulayat Pangulu yang bergelar Datuak Gindo Parkaso adalah danau yang tujuh dimana danau ini berada di ujung-ujung tanjung yang membentang dari desa pembatang sampai ke koto rajo, Kecamatan Kuantan Hilir. Mulai dari Meret 2009 hingga sekarang.

#### **3.2 Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan dengan lembaga adat, masyarakat adat dan kerapatan adat di Kenegerian Pangean dalam pemanfaatan tanah ulayat.



## 2. Data Skunder

Data pendukung yang diperoleh dari kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kuantan Singingi dan Kantor Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan dokumentasi lain yang mendukung penelitian

Data Sekunder ini berisikan antara lain :

1. Gambaran Umum Kecamatan pangean.
2. Profil Kecamatan Pangean.
3. Jumlah Suku yang ada di Kecamatan Pangean.
4. Luas Tanah Ulayat di Kecamatan Pangean.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah desa Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Pengulu nan barompek Kenegerian Pangean dan masyarakat Kenegerian Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ke empat belas Desa sebagai berikut :

Pengambilan sample, diambil 10%, untuk lebih jelasnya pengambilan sample pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

Pengambilan Sampel

No	Sup Populasi	Populasi	%	Sampel
1.	Aparat Dasa di Kec. Pangean			
	- Kepala Desa	14	100	14
	- BPD	84	10	8

	- Pengulu Nan Barompek Kev. Pangean	4	100	4
2.	Masyarakat Desa			
	- Desa Pasar Baru	5.466	-	6
	- Desa Koto Tinggi	304	-	5
	- Desa Pulau Tengah	535	-	5
	- Desa Pulau Kumpai	1.189	-	6
	- Desa Pulau Deras	822	-	5
	- Desa Tanah Bekali	853	-	6
	- Desa Teluk Pauh	405	-	5
	- Desa Padang Tanggung	354	-	5
	- Desa Padang Kunyit	630	-	5
	- Desa Pembatang	867	-	6
	- Desa Pauh Angit	1.623	-	6
	- Desa Sukaping	620	-	5
	- Desa Pulau Rengas	632	-	5
	- Desa Rawang Binjai	385	-	5
	Jumlah	14.787		99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Pangean

Pengambilan sample Menggunakan Rumus :  $n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$

Ket:  $n$  = Jumlah sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = Error%

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)} = \frac{14.787}{1 + 14.787(10\%)} = \frac{14.787}{1 + 14.787(0,01)}$$

$$= \frac{14.787}{14.787} = 99,32 = 99$$

Jadi, sampel / responden berjumlah 99 orang. Dari 99 Orang responden / sample yang diambil antara lain : Kepala Desa, Anggota BPD dan Pangulu Nan barompek Kenggerian Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan sebagian Masyarakat Desa.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Data yang diperoleh melalui buku-buku atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

#### 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

##### a. Observasi

Pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Objek penelitian yang diteliti penulis adalah Peranan Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Pangean.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Mengenai alat-alat atau instrument yang dapat menunjang dalam kemudahan jalannya penelitian ini, peneliti menggunakan alat tulis.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisi berarti memecah sesuatu dalam bagian-bagian atau unsur-unsur. Semua unsur tersebut dipelajari, dicari keterangan dan pengetahuan yang mendalam, pengetahuan yang diperoleh diperiksa kebenarannya, hubungan timbal balik antara unsur-unsur satu sama lain dan hubungannya dengan keseluruhan. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

#### Gambaran Umum Kecamatan Pangean

##### 4.1 Tinjauan Geografis

Kecamatan Pangean merupakan salah satu dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Benai
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Benai

Kecamatan Pangean memiliki 14 (empat belas) Desa dengan luas wilayah 139,42 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 14,706 jiwa. Kecamatan Pangean termasuk daerah yang dialiri oleh *Sungai Batang Kuantan* dengan lebarnya sekitar 150 meter.

**Tabel I.3**

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pangean

No	Nama Desa	Luas Wilayah ( Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk
1	Pasar Baru Pangean	8, 00	5, 466 jiwa
2	Koto Tinggi Pangean	3, 80	304 jiwa
3	Pulau Tengah	2, 32	535 jiwa
4	Pulau Kumpai	12, 00	1, 189 jiwa
5	Pulau Deras	7, 40	822 jiwa
6	Tanah Bekali	18, 20	853 jiwa
7	Teluk Pauh	11, 80	405 jiwa

8	Padang Tanggung	11, 00	354 jiwa
9	Padang Kunyit	11, 400	630 jiwa
10	Pembatang	12, 60	867 jiwa
11	Pauh Angit	13, 50	1, 623 jiwa
12	Sukaping	11, 80	620 jiwa
13	Pulau Rengas	9, 50	643 jiwa
14	Rawang Binjai	6, 10	385 jiwa
	Jumlah	139, 42 Km <sup>2</sup>	14, 706 Jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Pangean, 2010

Hampir sebagian besar desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Pangean dilalui aliran *Sungai Batang Kuantan* dan anak-anak sungai yang bermuara ke *Sungai Batang Kuantan*, walau demikian jarak antara desa yang satu ke desa lainnya tidak terlalu jauh.

Adapun jalan yang ditempuh oleh penduduk antar desa yang dibatasi oleh *Sungai Batang Kuantan* tersebut ialah dengan menggunakan perahu penyeberangan dengan memakai katrol yang digantungkan pada dawai yang membentang pada sungai, sehingga masyarakat Pangean menamakannya dengan sebutan *Kompang*.

Kecamatan Pangean merupakan daerah yang memiliki tanah dataran dan bergelombang dengan kemiringan tanah antara 0 sampai 3 persen, dengan jenis tanah *Podsolid Merah* (PH) antara 5, 50<sup>0</sup>C sampai dengan 6, 0<sup>0</sup>C. Sedangkan iklim diwilayah Pangean adalah iklim tropis dengan udara berkisar antara 19, 5<sup>0</sup>C sampai 34, 2<sup>0</sup>C yang dilewati dua musim yaitu musim hujan dan musi kemarau.

#### 4.2 Mata Pencarian Penduduk

Kecamatan Pangean merupakan suatu kawasan yang cukup luas, dengan kondisi tanah yang sangat baik bagi sektor pertanian dan perkebunan. Sehingga tidak mengherankan bila sebagian besar masyarakat Pangean bermata pencarian sebagai petani di sawah, petani kebun karet, petani kebun sawit. Meskipun demikian ada juga terdapat masyarakat yang mata pencariannya sebagai peternak, seperti ternak Ayam, Kambing, Sapi, Kerbau. Dan ada juga masyarakat yang menangkap ikan, bertukang, pedagang, pegawai negeri, karyawan perusahaan dan lain-lainnya.

Bercocok tanam, seperti padi merupakan salah satu mata pencarian masyarakat Pangean yang terkadang kurang menguntungkan. Semua ini disebabkan oleh musim kemarau yang sering ditemui, sehingga sering gagal panen. Selain itu, aliran irigasi yang tidak memadai dan ditambah lagi dengan pemahaman bercocok tanam yang kurang dikuasai dan mengakibatkan hasil panen tidak memuaskan. Hampir semua pengolahan lahan pertanian bagi masyarakat Pangean dilakukan dengan tenaga manusia.

Kemudian sebagian besar masyarakat Pangean berproduksi pokok sebagai pemotong karet. Memotong karet dilakukan oleh kaum laki-laki dan perempuan di mana hampir setiap warga memiliki lahan perkebunan karet yang minimal lokasinya berada di sekitar rumah warga. Setiap karet yang sudah tidak produktif lagi warga mengganti dengan cara memperbaharui dan menanam kembali dengan bibit karet yang baru.

Pada saat sekarang masyarakat Pangean menjadikan perkebunan sawit sebagai salah satu mata pencaharian. Masyarakat dalam pengolahan perkebunan sawit ini sebagian masyarakat telah mencicipi hasilnya. Pada saat perkebunan sawit membawa keberhasilan dan harga karet melemah, maka banyak masyarakat yang tadinya lahan yang ditanami dengan tanami karet ditanami kembali dengan perkebunan sawit. Karena masyarakat melihat, bahwa telah banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi hasil sawit dengan harga yang lumayan mahal.

Usaha lain yang ditekuni masyarakat Pangean adalah dibidang peternakan yang dilakukannya secara tradisional. Masyarakat Pangean yang berada di pinggir Sungai Batang Kuantan memanfaatkannya untuk menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka melakukan penangkapan ikan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka melakukan penangkapan dengan menggunakan *jaring* dan *jala*.

Masyarakat Pangean untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ada juga dengan bertukang. Mereka melakukan pekerjaan ini terlihat masih sederhana dan tradisional. Walaupun Pangean telah banyak melahirkan sarjan konstruksi, namun masyarakat tetap bertahan dengan teknik yang tradisional.

Pangean yang daerahnya agraris, tidak mengharuskan masyarakatnya berkebun dan bertani dan ada juga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai sedang. Karena kebiasaan masyarakat dalam hal jual beli sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga tidak mengherankan bila ada masyarakat Pangean berdagang sebagai pedagang kaki lima sebagai pedagang pertokoan.



### 4.3 Agama dan Kepercayaan

Masyarakat Pangean mayoritas menganut agama islam. Walaupun mayoritas masyarakat Pangean beragama islam, namun kepercayaan pada benda-benda pusaka seperti, *Keris Pusaka dan Ingg* (sebuah buntalan kain sebesar ibu jari yang telah dimantrai kemudian dililitkan pada pinggang). Ingg ini digunakan karena diyakini dapat menghindari diri seseorang dari gangguan penyakit. Selain itu memiliki kemenyan putih juga diyakini dapat mendatangkan *Pituah* (keberuntungan) Pispian Rahman, 2006 : 17. Kepercayaan terhadap benda-benda seperti ini dikatakan sebagai kepercayaan *dinamisme* sebagaimana yang dikemukakan oleh *Prijono Hutomo*, bahwa *dinamisme* adalah kepercayaan pada kekuatan gaib benda bertuah dapat menimbulkan hal-hal yang ajaib, membuat orang bertuah selama hidupnya, selalu mendapatkan keberuntungan sebaliknya orang-orang yang tidak bertuah sering sakit dan mendapatkan sial dalam kehidupannya sehari-hari (*Prijono Hutomo*, 2004 : 34).

Selain itu kepercayaan Animisme juga masih diyakini oleh sebagian masyarakat Pangean mempercayai adanya kekuatan magis. Menurut James Brondon yang merupakan sumber penting dari inspirasi artistik, seperti yang dikemukakan sebagai berikut :

“Seorang animisme percaya terhadap kekuatan magis yang penting dan luar biasa. Apabila seseorang pembuat atas nama orang lain bagi masyarakat secara menyeluruh perbuatan itu menjadi sebuah visual magis pada peradaban prasejarah, visual magis yang animistis pasti merupakan sumber penting dari inspirasi artistik”.

#### 4.4 Adat Istiadat

Dalam masyarakat adat Pangean terdapat empat macam suku, yaitu Suku Paliang, Suku Camin, Suku Melayu, dan Suku Mandahiliang. Keempat suku tersebut, masing-masing suku dipimpin oleh seorang pengulu dengan gelar pengulu suku yang berbeda pula. Seperti dalam Suku Paliang Pengulunya diberi gelar dengan Datuk Gindo Parkaso, Suku Camin bergelar Datuk Pakomo, Suku Melayu Pengulunya bergelar Datuk Topo, sedangkan di Suku Mandahiliang pengulunya bergelar Datuk Maruanso. Terpilihnya seorang pengulu (Pengulu Nen Barompek) adat sebagai pemimpin suku yang ada ialah berdasarkan pada keturunan para pengulu terdahulu berdasarkan garis keturunan Ibu (Matrilineal) yang mengacu pada ungkapan.

Ungkapan "*Aur yang nampak dimato dan ome rampang tindiah*". Artinya seorang pengulu harus benar-benar dari keturunan Ibu yang mengetahui sejarah dan kesepakatan terdahulu oleh Penghulu Nen Barompek. Apabila sudah ada kejelasannya, maka melahirkan komitmen bersama, bahwa *kalau keturunannya bodoh di ujari supaya cerdas dan kalau kehidupannya sukar suku tersebut harus memberi kelapangan*. Jika pemilihan penghulu adat mengacu pada ungkapan dan komitmen bersama di atas, maka seorang pengulu adat akan terlihat adil dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat adat. Karena keturunan sebelumnya telah mengikrarkan sumpah yang tidak boleh dilanggar yang apabila dilanggar akan mendatangkan kemelaratan bagi keturunan Pengulu tersebut.

Untuk tetap mempertahankan adat-istiadat yang telah dimanfaatkan oleh para leluhur merupakan suatu kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan oleh Pengulu Nri Barompek tersebut. Baik berupa kontrol kepada anak dan kewanakan sebagai penerus untuk tetap menjaga atau tidak melanggar aturan adat istiadat yang meliputi semua segi yang diantaranya aturan adat dalam pernikahan, sumatan, taron mandi, ziarah sopan santun maupun segi aspek perekonomian adat Pangean (tanah ulayat) dan lain sebagainya.

#### **4.5 Pendidikan dan Bahasa Masyarakat**

Pendidikan dapat dipahami sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi majunya suatu bangsa ataupun daerah disamping faktor-faktor pendukung lainnya. Sehingga hadirnya suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat perlu mendapat perhatian dari semua pihak, baik oleh intelektual, tokoh masyarakat, tokoh adat maupun pemerintahan daerah setempat. Sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusianya, terutama dalam masyarakat Pangean.

Kondisi pendidikan dalam Kecamatan Pangean dapat dikatakan cukup maju. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya sarana pendidikan, seperti Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan lembaga pendidikan non formal lainnya.

Bahasa yang dipergunakan di Kecamatan Pangean adalah bahasa daerah Pangean. Bahasa daerah Pangean ini dijadikan sebagai bahasa sehari-hari, baik dalam bidang perdagangan, pergaulan, maupun berbagai kegiatan yang

berhubungan dengan masyarakat setempat (masyarakat adat). Sedangkan Bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan formal atau proses pendidikan (proses belajar mengajar) serta dalam berkomunikasi dengan orang yang bukan asli masyarakat setempat (pendatang). Untuk bahasa lainnya dipergunakan dalam kehidupan keluarga saja.

#### 4.6 Kesenian Masyarakat

Di dalam masyarakat yang memiliki adat istiadat, kesenian tradisional memang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga kemajemukan budaya suatu daerah dapat dilihat dari segi kesenian yang berkembang di masyarakatnya yang akan menjadi *Icon* atau ciri khas tersendiri bagi masyarakat pendukung ataupun orang lain (asing) yang mengamatinya.

Kehadiran kesenian terutama musik tradisional memang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat adat Pangean. Hal ini dapat terlihat dalam acara-acara perhelatan yang diadakan oleh masyarakat.

Adapun bidang kesenian yang terdapat di Pangean serta sering digunakan oleh masyarakat adat Pangean dalam acara-acara perhelatan ialah seni musik. Seni musik tradisional yang terdapat dalam masyarakat Pangean antara lain, *Randai*, *Kayat*, *Robab*, *Rarak Godang*, *Calempong Onam*, *Rurak Oguang*, *Saluang* dan lainnya. Kesemuanya ini dipertunjukkan pada saat arak-arakan perjalanan dari rumah "*bako*" (pihak keluarga sebelah Bapak). Di mana perjalanan dari rumah bako merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat Pangean. Sedangkan musik *Saluang*, *Randai*, *Kayat*, *Robab*, memang dikhususkan sebagai penghibur para

undangan dan para kerabat guna untuk melepas rasa letih setelah melakukan acara perhelatan yang biasanya acara ini diadakan pada malam hari.

Namun seiring dengan masuknya arus transformasi budaya yang mengisi setiap media massa, tampaknya mulai menarik perhatian para generasi muda Pangean. Sehingga acara hiburan yang biasanya diisi dengan *Saluang, Rabab, Randai dan Kayat* kini beralih pada musik-musik yang menggunakan teknologi seperti musik Band dan Organ Tunggal. Bahkan dengan hadirnya musik jenis tersebut sebagai hiburan dalam acara-acara perhelatan, masyarakat menganggapnya sebagai acara perhelatan yang megah dan meriah. (Pispian Rahman 2006:21)

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Fungsi Tanah Ulayat Negeri Pangean**

Tanah ulayat dipahami sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu (ensiklopedia Indonesia), yang penguasaan atau pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum adat. Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya.

Kewenangan yang dimaksud berupa aturan yang membolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam tanah ulayat tersebut bagi kelangsungan hidup kelompok masyarakat hukum adat yang menguasainya. Selain terdapat kewenangan yang membolehkan suatu kelompok masyarakat hukum adat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam tanah ulayat, juga ada kewenangan yang mengatur larangan untuk memanfaatkan, terlebih untuk menguasai tanah ulayat yang dimaksud.

Tanah atau hamparan hutan yang dilarang untuk diambil manfaatnya atau dilarang untuk dikuasai ini, sering disebut orang dengan istilah hutan larangan atau dalam istilah masyarakat Bangka Belitung lebih dikenal dengan sebutan hutan larang. Kewenangan dalam hal mengatur boleh tidaknya memanfaatkan tanah ulayat ini biasanya menjadi tanggung jawab para tokoh adat. Pentingnya sebuah aturan mengenai boleh tidaknya memanfaatkan tanah ulayat tidak semata-mata karena alasan ekonomi, melainkan juga karena alasan lain

yakni kelangsungan hidup (eksistensi). Sebab, bagi masyarakat hukum adat, tanah ulayat (yang umumnya berupa hutan itu) tidak saja dijadikan sebagai tempat untuk bergantung hidup (berhuma, bercocok tanam dan berburu atau tempat untuk mengambil sumber daya alam lainnya seperti kayu, madu dan lain sebagainya) melainkan juga merupakan lingkungan sosial tempat mereka berinteraksi bahkan sebagai 'perkampungan'.

Dengan kata lain, tanah ulayat yang sebagian besar terdiri dari hutan adalah lingkungan budaya suatu masyarakat hukum adat. Jika lingkungan hutan yang didiami oleh masyarakat hukum adat menjadi rusak (semissal akibat dampak sebuah pembangunan, ekspansi perkebunan, pembukaan tambang dan lain-lain sebagainya) maka akan turut merusak tatanan kehidupan dan memicu tercabutnya kearifan lokal yang dimiliki oleh kelompok masyarakat hukum adat.

Sebab antara masyarakat hukum adat dan sumber daya tanah ulayat, memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat yang dimaksud dengan wilayah yang bersangkutan. Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat yang sebahagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah.

Tanah merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan masyarakat itu sendiri maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan Pendapatan Daerah, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan

penyambungan kembali ekonomi kemasyarakatan khususnya masyarakat adat yang terlingkup dalam tanah ulayat.

Di Kenegrian Pangean dalam kenyataannya masih diakui adanya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya Tanah Ulayat Nagori, Tanah Ulayat Suku dan Tanah Ulayat Kaum, yang diatur menurut adat yang berlaku di negeri pangean.

Hak persekutuan atas tanah disebut hak ulayat. Di dalam ketentuan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui dan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999, dijelaskan pula bahwasannya hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

1. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, pengaturan, dan pemeliharaan. Penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.



Adapun fungsi tanah ulayat di Kenegerian Pangean adalah :

1. Tanah Ulayat Negeri Pangean berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anak cucu kamanakan yang penguasaannya dilakukan oleh ninik mamak masing-masing suku yang terdapat di Negeri Pangean.

Tanah ulayat ini bisa nantinya dipergunakan oleh para kemenakan atau para cucu untuk kelangsungan hidupnya asalkan mendapat persetujuan dari masing-masing kepala suku atau para mamak yaitunya penghulu yang ada dimasing-masing suku dan apa bila disalahgunakan oleh para kemenakan atau para cucu maka akan mendapatkan sangsi dari penghulu.

2. Tanah Ulayat Suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi seluruh anggota suku pada negeri Pangean yang pengaturannya dilakukan oleh datuk penghulu suku, disinilah kekuasaan tertinggi atas tanah ulayat di Kenegerian Pangean.

Masing-masing suku yang ada di kenegerian pangean telah mendapatkan bagian tanah ulayat yang dan tanah ulayat tersebut hanya bisa dipergunakan oleh masyarakat yang menganut suku tersebut dibawah pengendalian kepala suku atau ninik mamak.

3. Tanah Ulayat Kaum berkedudukan sebagai tanah untuk pegangan masing-masing oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh Mamak Kepala Waris/Mamak Kepala Kaum.
4. Tanah Ulayat mempunyai fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang mempertimbangkan apa yang akan diwariskan dan diterima oleh anak, cucu, serta kaponakan.

### 5.2. Fungsi Lembaga Adat Negeri Pangean

Dalam melakukan studi tentang adat sekiranya tidak bisa meninggalkan tokoh-tokoh kolonial antara lain: Marsden, Montinghe, Crawford, Baud, B. Ter Haar, Snouck Hurgronje, C. Van VollenHoven. Terlepas dari kepentingan mengapa mereka dengan serius mengangkat masalah adat sebagai sebuah kajian, tapi yang pasti para tokoh-tokoh inilah yang meneliti dan mengangkat adat sebagai sebuah konsep ilmu pengetahuan hukum. (Halkis:2006; 45)

Dalam implementasi otonomi daerah, idealnya Lembaga Adat dapat memiliki kontribusi sebagai komponen masyarakat yang ada di daerah. Peranan di sini dimaksudkan adalah tentang perihal apa yang dapat dilakukan Lembaga Adat dalam masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan. Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan. Adapun tugas dan fungsi lembaga adat, berikut ini penulis kutip rumusan dari Permendagri No.3 Tahun 1997 sebagai berikut:

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
2. Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Selanjutnya Lembaga Adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut :

1. Mewakili masyarakat adat ke luar, yakni dalam hal menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat.
2. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih layak dan lebih baik.
3. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan- kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undang-undang tentang pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat tidak secara khusus melampirkan tujuan lembaga adat.

Fungsi lembaga adat secara umum seperti tertuang pada pasal 10 ialah:

1. Mengusahakan kelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan adat istiadat.
2. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat, mengusahakan pembinaan, pemberdayaan.
3. Menyelesaikan urusan adat istiadat.
4. Membantu pemerintah sepanjang menyangkut adat istiadat.

### 5.3. Peranan pemerintahan desa dan lembaga adat dalam pemanfaatan tanah ulayat.

Tanah ulayat dalam wilayah Kenggerian Pangean itu berawal dari musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan oleh Penghulu Nen Barompek, yakni Datuk Topo, Datuk Gindo Parkaso, Datuk Pakomo, dan Datuk Maruanso yang disaksikan oleh Datuk Tongah. Datuk Tongah merupakan keranjang adat oleh Penghulu Nen Barompek.

Salah Ibrahim Datuk Topo (Pengulu Nan Barompek) mengatakan :

*"akan berlaku adil dalam menyelesaikan sengketa adat dan masyarakat adat Pangean."*

Musyawarah yang dilakukan itu menyepakati, bahwa pengulu memiliki kewenangan Ulayat masing-masing. Ulayatnya Penghulu Datuk Topo adalah hutan Rawang yang dijajari tumbuh-tumbuhan, seperti daerah persawahan. Kalau kayu, akar dan hasil hutan itu merupakan ulayat penghulu Datuk Maruanso. Ulayat Penghulu Datuk Pakomo berbentuk tanjung yang menonjol, seperti sungai. Sedangkan ulayatnya pengulu Datuk Gindo Parkaso adalah danau yang tujuh, dimana danau ini berada di ujung-ujung tanjung yang membentang dari Desa Pembatang sampai ke Koto Rajo, Kecamatan Kuantan Hilir.

Secara pemakaian ulayat Penghulu Nen Barompek itu adalah hak masyarakat adat. Dan untuk memakainya adalah suku yang empat dengan mematuhi, menuruti peraturan dan ketentuan Pengulu Nen Barompek. Kalau tidak menuruti aturan dan ketentuan tersebut tidak dibenarkan untuk memakai atau mengolah ulayat tersebut.

Luas Ulayat Kenegerian Pangean tidak ada bukti tertulis yang menentukan jumlahnya. Melainkan luas ulayat Kenegerian Pangean itu terbentang sepanjang Hutan Sako (Rimbo Sako) dan Hutan Air Hitam (Rimbo Air Hitam). Batas wilayah ulayat Pangean sebagai berikut :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Inuman
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Ulayat Sentajo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Sailun, Kampar
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei. Elang Kecil dan Besar, Peranap.

Hasan Basri Datuk Pakomo (Penghulu Nen Barompek) mengatakan :  
 "Sesuai dengan keputusan Residen Riau pada 24 April 1819 yang memutuskan bahwa setiap negeri (nagori) mempunyai hak ulayat. Sehingga ditentukan hutan-hutan dan hutan larangan dengan memberikan hak ulayat kepada nagori sesuai dengan pembagian masing-masing.

Dapat dilihat, bahwa pemanfaatan tanah ulayat di Pangean melibatkan masyarakat adat Pangean. Karena sesuai dengan ketentuan adat yang mengharuskan pengelolaan tanah ulayat ini kepada masyarakat adat oleh Pengulu Nen Barompek untuk kepentingan masyarakat.

#### **5.4. Hubungan Antara Adat, Masyarakat Adat dan Tanah Ulayat**

Adat merupakan aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala yang sudah menjadi kebiasaan yang berupa wujud gagasan, kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem (Hoetomo, 2005 : 16).

Setiap masyarakat pasti memiliki sistem nilai yang dipedomani dan dihargai oleh masyarakat tersebut dalam interaksi sosialnya. Nilai-nilai tersebut sepanjang memang fungsional akan tetapi telah hidup dan mentradisi dalam masyarakat itu. Nilai-nilai yang mentradisi itulah yang dinamakan adat istiadat. Karena nilai-nilai tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diyakin kebenarannya dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, maka dinamakan hukum adat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa menilai dan dinilai perilakunya.

Mak Aniar yang merupakan tokoh masyarakat adat Pangean mengatakan, bahwa : “Adat seperti pemanfaatan tanah, bahwa tanah yang sudah digarab dan didiami selama tiga tahun yang tidak ditanami tanaman, seperti karet. Kemudian pengelolah tidak lagi memanfaatkan tanah tersebut selama tiga tahun, maka tanah tersebut kembali menjadi hak ulayat pengulu menjadi hak untuk milik bersama. Apabila tanah tersebut dikelola oleh si A, maka pihak yang menggarap pertama tidak boleh menuntut, karena batal menurut hukum adat. Kemudian adat yang dipakai setiap punya suami istri, baik yang punya anak, diumpamakan : bahwa suami istri tersebut telah mendapat harta, seperti tanah kebun atau tanah sawah, apabila suami meninggal berhak kemenakan yang laki-laki mendapat bahagian, karena bahagian suami hanya sepertiga. Hasil dari pengelolaan tanah oleh masyarakat, seperti kayu, yang menghasilkan papan maka pembagiannya 10 : 1 (dalam menghasilkan 10 keping papan, maka pengulu Nen Barompek

mendapatkan 1 keping papan) itu ketentuan adat, tetapi kalau masyarakat tidak memberikannya tidak masalah”.

Selanjutnya : “Kalau hak Ibu dengan Bapak, seperti lembu terhadap pembagian anak. Dengan ketentuan, bahwa pagi dilepaskan dan sorenya dikurung. Hak Mamak, walau bagaimanapun sesuatu hal yang gentiang (sulit karena tidak bisa dipertahankan lagi) Mamaklah yang memutuskan dan yang biang (samar-samar) Mamaklah yang menembuskan. Istilahnya, kalau kemenakan ada perkara, Mamaklah yang didepan untuk menyelesaikan. Walaupun menghadapi nikah kawin, perempuan atau laki-laki yang punya urusansampai siap nikah adalah hak Mamak yang menannggulangnya.

Pemanfaatan tanah ulayat di negeri Pangean, secara pemakaian itu adalah ulayat Penghulu Nen Barompek. Ulayat tersebut merupakan hak dari setiap masyarakat adat yang ingin memanfaatkannya. Setiap masyarakat adat yang ingin mengelolanya harus mematuhi ketentuan adat, ketentuannya sebagai berikut :

1. Penggarap wajib membayar “Taku” kepada Pengulu Nen Barompek Nagori Pangean sebesar 2,5% dari hasil bersih setiap bulan selama menghasilkan (produktif).
2. Tanah garapan yang diberi hak penguasaan ini tidak boleh diperjual belikan atau diagunkan kepada pihak lain.
3. Apabila tanah garapan yang diberi hak penguasaan ini tidak digunakan lagi dan telah terlantar lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-berturut, maka dengan sendirinya Surat Keterangan Hak Atas Tanah ini dinyatakan batal. Tanah garapan dimaksud kembali menjadi Hak Ulayat Nagori Pangean.

Aturan ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.

Datuk Khaidir (Tokoh Masyarakat) Pangean mengatakan :

“Nilai-nilai adat yang ada di Nagori Pangean makin hilang. Sehingga banyaknya masyarakat adat yang tidak tahu dengan adat dan budaya Nagori Pangean itu sendiri. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya komersialisasi budaya. Nilai adat dan budaya yang ada di Pangean selah menimbulkan perbedaan pemahaman. Sehingga generasi muda dihadapkan pada pembohongan sejarah dan ini perlu pelurusan, guna melahirkan generasi muda yang mengerti adat istiadat, budaya dan sejarah Nagori Pangean”.

Hal ini diungkap oleh Mak Sincun (Tokoh Pemuda) mengatakan, bahwa :

“Keberadaan tanah ulayat bagi sekelompok masyarakat adat memang telah memberikan manfaat . Hal ini bisa dirasakan dari penghasilan perkebunan dan pertanian . Manfaatnya itu hanya bagi sebagian kecil masyarakat di Nagori Pangean dan masih banyak yang belum menikmati secara langsung’.

Adat merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat. Adat senantiasa sering mengatur segala aspek kehidupan masyarakat adat. Dalam hal pemanfaatan tanah ulayat, adat memperbolehkan masyarakat adat untuk mengelolanya atas izin dari Penghulu Nen Barompek. Masyarakat adat berhak untuk mengelolanya, tetapi ulayat tersebut tidak boleh diperjual belikan.



### **5.5. Peranan Pemerintahan Desa Terhadap Lembaga Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Kenegerian Pangean**

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah terbuka kesempatan bagi daerah untuk mengakomodasikan nilai dan lembaga adat ke dalam struktur pemerintahan desa. Memotivasinya dalam pengakomodasian lembaga adat lebih didorong oleh keinginan untuk memfungsikan birokrasi pemerintahan desa supaya lebih mampu berperanan dari pada keinginan untuk menghidupkan nilai dan lembaga adat.

Dalam pengakomodasian lembaga adat ini terdapat Tiga Alternatif, yaitu : *Pertama*, Lembaga adat dimasukkan kedalam struktur pemerintahan desa sebagai bahagian dari struktur yang berfungsi sebagai legislatif di tingkat pemerintahan desa. Keutungannya antara lain :

1. Lembaga adat dan lembaga birokrasi bisa hidup berperanan secara berdampingan dalam komunitas masyarakat desa. Keduanya dibatasi secara fungsional bukan secara geografis dan hirarkis.
2. Pada saat diadakan penataan dan peningkatan mutu lembaga birokrasi, lembaga adat ikut serta dalam proses tersebut.
3. Lembaga adat akan berpeluang besar untuk tetap terbuka kepada perubahan-perubahan, karena dia memiliki akses pada jalur birokrasi dan bagian dari birokrasi desa.

Kelengahannya, yaitu :

1. Kemungkinan nilai dan lembaga adat akan terpengaruh oleh nilai birokratis lebih besar, karena dia sudah bagian dari birokrasi pemerintahan, akibatnya dalam jangka panjang nilai adat bisa luntur.
2. karena lembaga adat dan birokrasi dipisah secara fungsional, maka ada kemungkinan konflik antara kedua lembaga tersebut.

*Kedua*, antara lembaga adat dengan birokrasi dipisahkan berdasarkan "ruang" kewenangan yang bersifat hirarkis. Dalam hubungan ini lembaga adat "perpanjangan tangan" dari birokrasi kepada masyarakat. Secara hirarkis lembaga adat berada dibawah birokrasi pemerintahan desa secara organisatoris. Artinya, lembaga adat akan selalu diintervensi oleh pemerintahan desa. Hal ini tidak kondusif bagi pemberdayaan adat.

*Ketiga*, lembaga adat dan birokrasi desa berada terpisah dan memiliki kewenangan dan aktivitas sendiri. Perlu ditegaskan kewenangan lembaga adat dan lembaga birokrasi. Dampak dari hal semacam ini adanya persaingan antara kedua lembaga tersebut dan mengakibatkan konflik yang lebih besar.

Pemerintahan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam memperdayakan masyarakat dipedesaan menetapkan, bahwa aspek pertanian dan perkebunan merupakan komoditi unggulan. Misalnya perkebunan sawit, karet dan kakao serta padi. Pemerintahan daerah melalui pemerintahan desa memiliki berbagai program untuk pengelolaan disektor perkebunan dan pertanian untuk kesejahteraan masyarakat.

Program pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah mengalokasikan anggaran untuk perkebunan dan pertanian dengan memberikan bibit kepada masyarakat.

Sebelumnya pada masa kolonial, dikenegerian Pangean tidak mengenal pemerintahan, yang ada hanyalah agama, adat dan silat dikenal dengan "*tali tiga sapilin*". Karena tiga unsur ini telah mampu membangun kehidupan bermasyarakat kenegerian Pangean. Setelah Indonesia merdeka, sejak zaman orde lama sampai sekarang kenegerian pangean mulai mengenal pemerintahan dengan unsurnya adalah pemerintah, agama dan adat yang masih dikenal dengan "*tali tiga sapilin*".

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Yasmin (Kepala Desa Koto Tinggi Pangean), bahwa :

"Secara umum, pemerintahan desa yang ada Kenegerian Pangean Kecamatan Pangean memberikan usulan kepada lembaga adat agar pemanfaatan tanah ulayat yang ada di Negeri Pangean yang belum tersentuh tangan manusia, mohon dilestarikan. Kemudian ada hutan "sosok" (lahan yang sudah lama tidak digarap), pemerintahan desa berusaha mengajukan suatu bantuan yang berbasis pembangunan, seperti lahan, bibit dan sarana lainnya. Ini merupakan bentuk pemanfaatan tanah ulayat Negeri Pangean di daerah pedesaan. Tetapi mengenai pemanfaatan tanah ulayat yang berbentuk hutan, pemanfaatannya itu adalah kewenangan Pengulu Nen Barompek".

Kemudian Bapak Yasmin mengatakan :

“Pemerintahan desa dalam hal pemanfaatan tanah ulayat, tidak menyetujui pengelolaannya diserahkan sepenuhnya ke kontraktor atau investor. Sebab kontraktor dan investor hanya mementingkan keuntungan dan tidak memperhatikan kelestarian hutan. Artinya mereka hanya merusak hutan ulayat Pangean. Sehingga jika hutan rusak berakibat kepada masyarakat, bahwa hutan yang ada saat ini tidak lestari lagi untuk generasi berikutnya. Sehingga masyarakat tidak lagi memiliki hak-hak ulayat dalam pengelolaan tanah tersebut. Hal ini disebabkan karena ketidakpedulian kita terhadap apa yang menjadi hak-hak masyarakat Pangean. Sehingga masyarakat begitu mudah dimanfaatkan oleh sekelompok orang berkepentingan yang tidak punya tanggung jawab”.

Ditambahkannya lagi bahwa :

“Antara pemerintahan dan lembaga adat sesuai dengan fungsi dan kewenangan tidak sejalan . pemerintahan desa tidak punya wewenang dalam hal pemanfaatan tanah ulayat, khususnya hutan. Karena ini adalah hak dan wewenang Pengulu Nen Barompek. Pemerintahan desa terkendala oleh hak-hak ulayat dan adat istiadat, sehingga segala sesuatu yang menyangkut tanah ulayat pemerintah desa hanya sebagai proses administrasi dalam hal formalitas untuk kelancaran urusan dalam pemanfaatan tanah ulayat”.

Mak Aniar yang merupakan tokoh masyarakat adat Pengean mengatakan, bahwa :

“Setiap program dan keputusan pemerintah melalui pemerintahan desa yang menyangkut pemanfaatan lahan atau tanah dalam hal ini tanah ulayat harus dimusyawarahkan dengan Pengulu Nen Barompek dan baru program tersebut bisa

terlaksana. Program tersebut bukan dibalangi oleh *Pengulu*, melainkan harus diketahui oleh *Pengulu*. Begitu adat di Nagari Pangean”.

Dalam pemerintahan desa di kenegerian Pangean Kecamatan Pangean, ada dikenal *Tuah Banjar* yang merupakan perwakilan adat di pemerintah desa setelah *Pengulu Non Barompek*. Dalam masyarakat pedesaan yang dikepalai oleh kepala desa, kepala desa merupakan kemenakan, anak dan cucu dari *Pengulu*. Dengan adanya kerjasama antara kepala desa dan *Tuah Banjar* yang merupakan bagian dari *Pengulu* adalah bentuk kerjasama yang melibatkan pemerintahan desa dalam pemanfaatan hak-hak ulayat masyarakat adat.

Artinya pemerintahan desa dilibatkan dalam pemanfaatan hak-hak ulayat Pangean. Dalam pemerintahan desa terdapat adat istiadat yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat yang didalamnya termasuk pegawai pemerintahan pedesaan yang memiliki hak-hak ulayat. Maka apabila masyarakat adat ingin memanfaatkan hak-hak ulayat tersebut harus pula diketahui oleh pemerintahan desa, karena letak tanah ulayat berada di teritorial desa.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dijelaskan pada hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanah merupakan salah satu modal utama sebagai wadah kehidupan masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di Kenegerian Pangean masih diakui adanya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan dan penggunaannya diatur dan berdasarkan pada ketentuan hukum adat setempat yang dikenal dengan Tanah Ulayat. Tanah ulayat ini dapat dikelola dan dipergunakan oleh masyarakat hukum adat, dalam hal pemanfaatan tanah ulayat di Kenegerian Pangean diatur dan diawasi oleh Penghulu, karena hak pengelolaan ulayat merupakan wewenang dari Penghulu Nen Barompek yang ada di Kenegerian Pangean.
2. Masyarakat punya hak terhadap pemanfaatan tanah ulayat. Dalam pengelolaan tanah ulayat harus diketahui atau meminta izin kepada Penghulu Nen Barompek. Bagi masyarakat yang mengelolah ulayat tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan adat maka harus membayar 'laku' kepada penghulu untuk keperluan Pangean. Masyarakat harus mematuhi aturan adat dalam pemanfaatan tanah ulayat di Kenegerian Pangean. Dalam hal ini yang paling berperan adalah Lembaga Adat yang merupakan sebuah wadah organisasi

permusyawaratan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat dan masyarakat yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan. Yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, memberdayakan serta melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dalam rangka memperkaya daerah, menciptakan hubungan yang demokratis serta hubungan yang harmonis antara kepala adat, pemangku adat, dan pimpinan dengan pemerintah di daerah.

3. Pemerintahan daerah melalui pemerintahan desa dalam menjalankan program pembangunan di pedesaan harus di musyawarahkan dengan pengulu yang ada di Kenegerian Pangean. Hal ini adalah untuk memperlancar pembangunan di pedesaan. Mengenai pemanfaatan tanah ulayat di Kenegerian Pangean, pemerintahan desa tidak memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pemanfaatan ulayat tersebut. Kalau pun memiliki hak terhadap tanah ulayat hanya pemanfaatan tanah yang dikelola oleh masyarakat untuk bertani, tetapi harus diketahui oleh penghulu. Tanah ulayat sangatlah besar manfaatnya bagi masyarakat adat, masyarakat bisa mengelola tanah tersebut untuk kelangsungan hidupnya dan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara pemakaian tanah ulayat itu adalah hak masyarakat tapi dibawah kepemimpinan penghulu nan barompek kalau tidak mengikuti aturan dan ketentuan tersebut masyarakat tidak dibenarkan untuk memakai dan mengelola tanah ulayat tersebut.

Adat merupakan aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala yang sudah menjadi kebiasaan yang berupa wujud gagasan, kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem

## 6.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka untuk kemajuan bersama perlu memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pemanfaatan tanah ulayat di Kenegerian Pangean yang berwenang adalah penghulu Nen Barompek, sebaiknya mengenai hasil dari pengelolaan tanah ulayat tersebut penghulu melakukan transparansi terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat adat mengetahui, bahwa mereka memiliki ulayat dan manfaatnya terasa oleh masyarakat
2. Penghulu Nen Barompek yang ada di kenegerian Pangean dalam memberikan wewenang kepada masyarakat maupun para investor yang ingin mengelolah tanah ulayat Pangean, sebaiknya penghulu bersikap tegas, selektif dan komitmen terhadap perjanjian serta tidak melanggar aturan adat istiadat Pangean.
3. Pemerintahan Desa dan lembaga Adat dalam pemanfaatan tanah ulayat, sebaiknya pemerintahan desa menjalin hubungan fungsional dengan lembaga adat. Karena antara pemerintahan desa dan adat tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Pemerintahan desa punya program untuk rakyatnya dan begitu juga dengan lembaga adat yang punya rencana untuk masyarakat adatnya.



Selagi untuk kepentingan bersama, maka hubungan yang kondusif yang terhindar dari konflik bisa terjalin.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Bazar Harahap. Dkk, *Tanah Ulayat dalam Sistim Perantaraan Nasional*, Jakarta : 2005
- A. P. Perlindungan, *Komentar Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960*.
- Asrinaldi (dkk), *Peningkatan Kinerja Kabupaten di Sumatera Barat dalam rangka Otonomi Daerah*, Padang : Badan Pelatihan dan Pengembangan Sumatera Barat, 2004.
- Badan Pemutahiran Adat Kuantan Singingi, *Pedoman Pemutahiran Adat Kuantan Singingi*, Pekanbaru : 2000.
- Bayu Suryaningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Budiarjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*, gramedia Pustaka, Jakarta, 1991.
- Laxi. J. Malcong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001.
- Mohd. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. *Peranan Lembaga Adat Dalam era Otonomi Luas*, Institutes for Research Empowerment IRE, Yogyakarta, 2003.
- Pispian Rahman, *Skripsi : Musik Rarak Oguang dalam Masyarakat Adat Pangean, Padang Panjang, Sekolah Tinggi Seni Indonesia*, 2006.
- Rasyid, Ryaas. *Jurnal Ilmu Politik Otonomi Daerah : Latar Belakang dan Masa Depan*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2002.
- Rauf, Maswadi. *Mewujudkan Pemerintahan yang mendorong kemandirian Masyarakat menurut UU No. 22 / 1999*, makalah Disajikan Dalam Mubes Rakyat Kuansing di Teluk Kuantan, 9-10 juni 1999.

Syahmunir. *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Padang : Pusat Pengkajian Islam Minangkabau (PPIM) Sumbar, 2004.

Yanti, Dewi Suspita, Skripsi : *Pemekaran Wilayah Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* (Studi Historis Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi) Provinsi Riau, Padang : Fisipol Uniuersitas Ekasakti, 2005.